



# Cabut Bansos dan KJP Warga Bandel

JAKARTA- PSBB (pembatasan sosial berskala besar) Jakarta memasuki pekan kedua. Sayangnya, belum juga ada hasil signifikan, terutama dari penurunan aktivitas warga di luar rumah.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus meningkatkan peran RT dan RW dalam menjaga warganya untuk tetap di rumah selama PSBB di Jakarta. Dia mengusulkan, warga yang bandel bisa dicabut bansosnya.

"Siapa yang dijagain? Wilayahnya masing-masing. Terus apa sanksi? Enggak usah pidana, tapi kalau ada anak atau orang tua tak patuh aturan, cabut itu bantuan Pemda, baik KJP, baik bansosnya," kata Iman, di Jakarta, Senin (20/4/2020).

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra itu menilai, dalam situasi ini saatnya RT dan RW bekerja lebih keras. Terlebih mereka sudah dibekali uang operasional dari Pemprov DKI. "Itu yang paling efektif, RT/ RW dilibatkan. Kan dia juga dalam tanda kutip menikmati OP (operasional) dari Pemda. Sekarang inilah mereka waktunya berbuat secara *comprehensive*," tambah dia.

Iman menilai, sanksi seperti itu akan cukup efektif mencegah warga melanggar aturan phisycal distancing selama PSBB. Katanya, masyarakat tak akan patuh karena pencabutan bantuan adalah ancaman serius dan tak kalah berat dari sanksi penjara.

"Itu juga mereka pasti takut. Enggak usah diancam dengan penjara dan lain-lain. KJP ini modal hidup mereka. Itu lho. KJP ini kan urusannya sampai tingkat mahasiswa," tuturnya.

Iman Satria, meminta pihak berwajib mengontrol PSBB secara lebih



KJP ini modal hidup mereka. Itu lho. KJP ini kan urusannya sampai tingkat mahasiswa."

*Iman Satria  
Ketua Komisi E DPRD  
DKI Jakarta*

intens. Pengontrolan ini harus dilakukan sampai ke lingkungan permukiman, dan bukan hanya di jalan-jalan protokol.

"Tolong aparat-aparat yang ada di lapangan ini kerjanya agak sedikit lebih intens dan sering lagi untuk mengontrol. Terutama di pedalaman ya, jangan dilihat di Sudirman-Thamrin," ungkap Iman. Dikatakan, jika pengontrolan terpaku pada pusat-pusat perkotaan, maka bisa terjadi kesalahan asumsi karena banyak pelanggaran di pusat ibu kota. Padahal, di daerah pinggiran Jakarta pelanggaran masih banyak ditemukan.

"Kalau monitoringnya Sudirman - Thamrin, kelihatannya kosong. Tapi kalau kita masuk ke dalam, kayak ke Johar Baru, Tanah Tinggi. Di wilayah Cempaka Putih putih misalnya, itu di wilayah saya, masih ada beberapa pengelompokan orang-orang yang tidak mematuhi aturan PSBB," bebernya. Iman menilai sejauh ini hadirnya kebijakan PSBB di Jakarta bisa membantu mencegah penyebaran Corona. Namun, faktor kontrol dan pengawasannya masih harus ditingkatkan.

Sejalan dengan anjuran mengoptimalkan kontrol di lingkup permukiman, Iman juga meminta pemimpin di tingkat kecamatan, RT dan RW turut

aktif melakukan kontrol PSBB. "Itu kan sebenarnya bisa digerakkan dari lurah dan camat setempat dengan Satpol PP-nya. Saya juga mengimbau agar mereka semua itu benar-benar membantu kebijakannya Pak Anies," tutur Iman.

## Tutup Perusahaan

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, menilai perlu tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. Disnaker DKI Jakarta sudah menyidik ke 215 perusahaan yang diduga kuat melanggar PSBB di Jakarta. Hasilnya, 25 perusahaan ditutup sementara karena bandel terus-terusan buka meski telah ditegur.

Politikus Partai Demokrat itu menilai, upaya Pemprov DKI dengan menutup sementara atau memberi teguran keras kepada para perusahaan pelanggaran PSBB, harusnya bisa memberikan efek jera. Namun, bila itu ternyata tak cukup, kaya Mujiyono, pemerintah bisa mendata perusahaan untuk di-black list dari data calon penerima program-program bantuan dana atau stimulus ekonomi di masa mendatang.

"Menjadi catatan Pemprov DKI aja, begitu kondisi normal kembali, bila mana ada program stimulus ekonomi untuk

dunia usaha, yang begitu jadi catatan, jangan dikasih," ungkap Mujiyono, di Jakarta, Senin (20/4/2020). Mujiyono tak menjamin langkah seperti itu akan efektif atau tidak mencegah perusahaan membandel. tapi, paling tidak itu salah satu bentuk langkah tegas yang bisa diambil dalam rangka menekan penyebaran virus Corona di Jakarta.

"Soalnya kebijakan PSBB ini nanggung. Karena (lebih) mengandalkan kesadaran masyarakat. Masyarakat kita, kalau lagi kondisi begini harusnya streng, enggak boleh ya enggak boleh," ucapnya.

## Pasar Ramai

Pasar Ikan Hias Jatinegara viral karena masih ramai di tengah masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). DPRD DKI Jakarta menilai seharusnya pengawasan harus lebih ketat agar tidak terulang lagi di tempat-tempat lainnya termasuk di pasar tersebut.

"Iya saya kira harus dilakukan pengawasan lebih ketat lagi. Semua aparat terutama aparat pemerintah daerah harus turun," ujar Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik.

Dirinya menyebut tempat-tempat yang berpotensi dapat menimbulkan kerumunan masa harus segera dilarang. Menurutnya, pasar-pasar yang notabene menjadi tempat yang dicek-cualikan bisa tetap buka saat PSBB juga harus ada pengawasan ketat dari aparat. "Harus diawasi sentra-sentra begitu, tempat pertemuan masyarakat harus diawasi. Pasar tradisional saya kira harus ikuti protokol kesehatan, harus diawasi betul," katanya.

Bahkan, kata dia, pedagang-pedagang yang dapat menimbulkan kerumunan masa dan nekat membuka toko harus

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

# Cabut Bansos dan KJP Warga Bandel

diberikan sanksi. Namun, kata dia, sanksi itu bisa diberikan apabila imbauan dan teguran sudah tidak diperhatikan lagi. "Saya kira pak gubernur sudah membuat aturan-aturan, dilaksanakan aja aturan itu kalau memang waktunya harus diberikan sanksi ya diberikan sanksi. Tentunya dengan proses teguran, peringatan, baru kemudian ada sanksi lebih tegas," katanya.

Sebelumnya, suasana hiruk-pikuk tampak di Pasar Ikan Hias, Jatinegara, Jakarta Timur, di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pagi tadi. Ada sejumlah warga di pasar yang sedang membeli ikan hias dan tak memakai masker.

Foto kerumunan di Pasar Ikan Hias, Minggu (19/4/2020) itu diunggah oleh Ammar Fawzi melalui Instagram Stories-nya di akun @goldfaser. Fotonya ini kemudian di-repost oleh akun Instagram @jktinfo yang memiliki pengikut lebih dari 2 juta akun. Foto ini viral dan mendapat beragam tanggapan.

Dalam foto tersebut, tampak ada kerumunan warga lebih dari lima orang. Warga berkerumun di sekitar emperan toko. Sementara di sisi jalan banyak sepeda motor terparkir, hampir memakan area badan jalan.

## Hentikan KRL

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani resah dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun tidak menerapkan penghentian operasional Kereta Rel Listrik (KRL).

Kementerian Perhubungan (Kemhub) memilih melakukan pembatasan operasional KRL Jabodetabek ketimbang penghentian KRL selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) karena pandemi Corona (Co-

vid-19). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyebut pejabat terlalu banyak melontarkan istilah yang membuat masyarakat kebingungan.

"Saya kadang resah melihat pejabat bicara bukan ini dan bukan itu. Jangan kebanyakan istilah. Pembatasan bukan penghentian. Warga jadi bingung. Ada situasi tertentu, menurut saya, terutama ketika krisis, kita mesti hitam-putih saja lihat masalah," kata Zita.

Dirinya menyebut tidak semua warga paham terkait kebijakan pembatasan KRL. Kebingungan ini bisa menimbulkan bahaya penyebaran virus Corona di stasiun. "Kan tidak semua kita cepat paham pembatasan atau penghentian. Ada warga yang datang ke stasiun, tahunya habis waktunya nunggu di stasiun karena kereta lama, lalu malah terjadi penularan," ujar Zita.

"Kalau ingin pembatasan sosial, ya, hentikan saja (operasional KRL). Biarkan ambulans saja yang jemput kalau ada yang kritis. Kita ingin ini cepat menurun. Kurva masih belum landai," tambah anggota Fraksi PAN itu.

Zita mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta operasional KRL dihentikan selama PSBB. Dia menyebut, pekerja formal ataupun informal akan sama-sama terkena imbas penghentian KRL.

Menurut Zita, kondisi yang saat ini masih terjadi di Jakarta, akibat masyarakat masih bingung dengan aturan PSBB. "Kalau ingin pembatasan sosial, ya hentikan saja," kata dia. Tertahannya penumpang KRL, kata Zita, merupakan imbas dari pembatasan jam operasional. Penumpang menjadi tidak paham regulasi yang ada, karena mereka bingung dengan waktu operasional (dmi)